

PENDIDIKAN TINGGI KEPOLISIAN DI INDONESIA : SEJARAH PENDIDIKAN TINGGI KEPOLISIAN DAN KAJIAN ILMU KEPOLISIAN SERTA KEDUDUKAN KIK-UI DALAM STRUKTUR PENDIDIKAN POLRI

Awaloeddin Djamin

I. Pendahuluan

Masalah ini perlu untuk ditulis karena sudah banyak yang melupakan sejarah, yang dapat membawa kerancuan atas keadaan pendidikan tinggi kepolisian dewasa ini. Lahirnya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1950 sebagai peningkatan Akademi Polisi yang lahir pada masa revolusi (17 juni 1946) yang pertama kali menggunakan istilah “ilmu kepolisian”, tentu perlu dipahami beserta perkembangannya selama 60 tahun ini.

Tulisan singkat ini tidak akan membahas atau memperdebatkan apakah ruang lingkup ilmu kepolisian, apakah *multi-disiplinair*, *inter-disiplinair* atau *mono-disiplinair*; antara lain karena sudah ditulis oleh almarhum Prof. Harsya Bachtiar, Prof Parsudi Suparlan, dan lainnya.

II. Sejarah Ringkas Pendidikan Kepolisian, Khususnya Pendidikan Tinggi

Sistim pendidikan dari suatu organisasi selalu merupakan sub-sistim dari manajemen personalia atau SDM organisasi yang bersangkutan.

Pendidikan kepolisian pada zaman penjajahan Belanda mengikuti kebijakan kolonialnya. Dimana saat itu dibagi jabatan untuk bangsa Eropa (Belanda) dan bangsa pribumi (*inlanders*). Pada mulanya jabatan dan pangkat *Hoofdagent*, *Inspecteur van Politie* dan *Commisaris van Politie* adalah hanya untuk bangsa Belanda. Dengan demikian pendidikan *Hoofdagent*, *Inspecteur* dan *Commisaris van Politie* tertutup bagi bangsa Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia ada pangkat Mantri Polisi, Asisten Wedana Polisi dan Wedana Polisi, yang pendidikannya adalah di OSVIA dan MOSVIA.

Pada permulaan abad ke XX pendidikan (tentu diikuti oleh pangkat dan jabatan) *Hoofdagent, Inspectur* dan *Commisaris van Politie* dibuka bagi bangsa Indonesia dari keluarga pejabat Hindia Belanda.

Jadi untuk pangkat dan jabatan tinggi ada *Commissarisen Cursus*, kursus Komisaris Polisi waktu itu, adalah pendidikan tertinggi kepolisian di Hindia Belanda. Kepala Kepolisian Negara RI yang pertama, Bapak R.S. Soekanto adalah tamatan *Commissarisen Cursus* tersebut.

1. Akademi Polisi dan PTIK

Pada masa revolusi 1946, Kepala Kepolisian Negera Soekanto dan para guru besar terkenal Indonesia waktu itu merasa bahwa untuk pemolisian Negara Merdeka, perwira-perwiranya perlu memiliki latar belakang pendidikan "akademis". Maka pada tanggal 17 Juni 1946 lahirlah Polisi Akademi (kemudian berganti menjadi Akademi Polisi). Awal lahirnya, Akademi Polisi membuka dua angkatan. Angkatan I (salah satu mahasiswanya Hugeng Iman Santoso) dan Angkatan II (mahasiswanya a.l. Soejoed Binwahjoe dan Suparno). Kedua angkatan ini tidak sempat selesai, karena para mahasiswanya ikut dalam perang kemerdekaan. Dekan dan guru besar dalam Akademi Kepolisian dari awal adalah Profesor-profesor terkenal Indonesia, sedang pengajar mengenai kepolisian seperti *dachloscopy*, dan lain-lain diberikan oleh perwira-perwira polisi.

Setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1950, Akademi Polisi dipindahkan ke Jakarta dan ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Pertama dalam pendidikan tinggi di Indonesia diperkenalkan "ilmu kepolisian" dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini pula yang pertama memberi gelar *doctorandus* (Drs.) Ilmu Kepolisian.

Dosen-dosen PTIK dapat dikatakan terdiri atas guru besar-guru besar terkenal dari berbagai Fakultas di Universitas Indonesia, seperti Prof. Djokusutono, Sunario K. Sanyatawijaya, Satochid, Sumitro Djojohadikusumo (Dekan Fakultas Ekonomi), Prijono (Dekan Fakultas Sastra), Noach, Beerling, Drost, Sudiman, Tjan Tju Sim, Hazairin, dan lain-lain.

Sebagian besar kuliah digabung dengan Universitas Indonesia, terutama Fakultas Hukum. Untuk mata pelajaran khas kepolisian, diberikan di PTIK seperti antara lain; hangar, baris-bebaris, *dachloscopy* dan bahasa Cina. Ada beberapa guru besar yang didatangkan dari Belgia, yaitu Prof. Gunsburg dan Ceulenaar untuk mata pelajaran kriminalistik. Pada mata kuliah Sejarah Kepolisian diberikan oleh Kombes Subarkah, Toksikologi oleh Abels, kemudian kemiliteran oleh Greutink (bekas perwira AD Belanda) dan Fotografi Forensik oleh Nos.

Untuk mahasiwa, dalam pelaksanaan awalnya PTIK mengangkat mahasiswa Angkatan I dan II dari Akademi Polisi sebagai Angkatan I dan II PTIK dan baru Angkatan III dibuka tahun 1950.

Sistim pendidikan di PTIK, sama dengan Universitas Indonesia, dan lain-lain perguruan tinggi waktu itu yaitu menganut sistim kontinental Eropa (Belanda). Dibagi dalam propadeuse, *candidat* I dan II, *doctoral* I dan II. Sistim kontinental tidak mengenal gelar Master atau Magister, seperti negara-negara Anglo-Saxon. Dalam ijazah *doctoral* II diberi gelar *doctorandus* dan dicantumkan "dapat mencapai gelar tertinggi" (yaitu gelar doctor dengan bimbingan seorang professor) dalam ilmu kepolisian.

Sayangnya tidak satupun tamatan PTIK tahun '50 dan '60-an yang memanfaatkan kesempatan mengambil gelar doktor. Bila ada doktor ilmu kepolisian waktu itu, tentu status "ilmu kepolisian" dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tidak akan rancu sampai akhir tahun 1970-an.

Tentang status ini sebenarnya juga agak aneh, karena semua guru besar PTIK adalah juga guru besar Universitas Indonesia. Kendala mengenai kerancuan status PTIK datang dari guru besar fakultas kedokteran, teknik dan lain-lain Universitas di luar Universitas Indonesia yang berpegang pada fakultas-fakultas tradisional Kedokteran, Hukum, Tehnik dan Sastra yang dianggap baku.

Keadaan status yang terkatung-katung hingga akhir tahun '70-an ini, memperlengah alasan sewaktu MABES ABRI akan membubarkan PTIK. Karena dalam sistim pendidikan ABRI, tidak ada lembaga yang memberi gelar.

Sewaktu saya menjabat Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN), dalam satu pertemuan di tahun 1972 dengan Presiden Soeharto, Menteri P & K Syanif Thayeb, Mensesneg Sudharmono, Menaker Subroto, Menteri P&K

melaporkan kepada Presiden tentang PTIK yang "ilmu kepolisiannya" hanya diajarkan pada anggota Polri. Suatu ilmu, kata Syanif Thayeb seharusnya dapat dipelajari oleh siapa saja.

Menjadi sebuah keberuntungan saat itu karena Presiden Soeharto setelah mendengar hal tersebut hanya meminta Menteri P&K dan Ketua LAN mempelajari masalah ini, sehingga pertemuan itu tidak membuat keputusan apa-apa berkaitan dengan keberadaan PTIK.

Setelah itu PTIK aman sampai akhir tahun 70-an. Pada tahun 1978, saat saya baru menjabat KAPOLRI, dalam satu pertemuan dengan Wapangab/Pangkokkamtib Laksamana Sudomo, beliau memperlihatkan dua disposisinya, yaitu: 1. Menghapus PTIK, karena tidak terdapat dalam sistim pendidikan ABRI dan 2. Agar SIM dan STNK dipindahkan ke Departemen Perhubungan.

Karena mengenal secara pribadi Laksamana Sudomo (dia yang menelpon saya secara rahasia bahwa Presiden memanggil saya sepulang dari Jerman untuk menjabat KAPOLRI), saya meminta agar disposisi itu jangan dilanjutkan dulu dan memberi kesempatan kepada saya sebagai KAPOLRI untuk mempelajarinya secara mendalam.

Itulah sebabnya, kenapa seorang KAPOLRI baru yang menghadapi banyak masalah memprioritaskan status PTIK. Pendidikan Tinggi dan keberadaan suatu disiplin ilmu masuk lingkup tugas dan tanggung jawab Departemen P&K maka untuk memperjernih persoalan, KAPOLRI bersama Menteri P&K Daud Yusuf membentuk tim gabungan yang terdiri atas Departemen P&K, Polri dan Universitas Indonesia untuk mempelajari dan membahas hal tersebut.

Pembahasan tentang ilmu kepolisian memakan waktu satu setengah tahun (30 Januari 1979 — 11 Agustus 1980) dan menghasilkan argumentasi objektif tentang Ilmu Kepolisian dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Hasil tim ini dirumuskan dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri P&K dan KAPOLRI yang antara lain; (a) Berisi Universitas Indonesia adalah Pembina Akademis PTIK, (b) Dekan PTIK dipilih dari dosen UI, diangkat dan dilantik oleh Menteri P&K. (Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 0214/0/1980 dan No. Kep./12/VII/80 tentang "Pembinaan, pengembangan dan tanggungjawab Bidang Akademik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Dengan keluarnya SK Menteri P&K, maka berakhirilah kerancuan status PTIK yang hampir 30 tahun dan keberadaan Ilmu Kepolisian dan PTIK secara resmi terjamin. MABES ABRI tidak mempersoalkannya lagi.

Dekan pertama setelah terbitnya SK bersama Menteri P&K dan KAPOLRI, yang diangkat dan dilantik oleh Menteri P&K adalah Prof. Dr. Harsya Bachtiar (28 Agustus 1980). Menteri P&K Daud Yusuf dalam pelantikan Dekan Harsya Bachtiar, menyampaikan pidato tentang Ilmu Kepolisian. Saat menjabat Dekan PTIK, Prof. Harsya menulis buku yang pertama di Indonesia mengenai Ilmu Kepolisian.

Seperti diuraikan diatas, mata pelajaran PTIK pada tahun 50-an titik beratnya ada pada ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan acara pidana. Prof. Hazairin mengajar hukum adat, Prof. Prijono tentang Islam, Prof. Beerling tentang sosiologi, Prof. Noach mengajarkan kriminologi, Prof. Drost di hukum internasional, Prof. Djokosutono mengajar Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara.

Pada awal tahun 50-an, Ilmu Administrasi dan Manajemen belum dikenal hanya disinggung oleh Prof. Sumitro dalam mata pelajaran ekonomi pembangunan.

Berkali-kali Prof. Djokosutono menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan tinggi adalah agar para mahasiswa mampu berfikir akademis (*academisch denken*), berfikir rasional dan logis.

Kala itu, pendidikan PTIK berlangsung 5 tahun namun kemudian karena pengaruh anglo-saxon, dipecah menjadi sarjana muda dan sarjana lengkap. Gelar SMIK (Sarjana Muda Ilmu Kepolisian) sama dengan Bachelor di Amerika Serikat.

2. Akademi Polisi dan PTIK sebagai perguruan tinggi kedinasan

Polri, sebagai kepolisian nasional (*national police*) dari Negara Indonesia yang terdiri atas lebih 17.000 pulau, suku bangsa, agama, kebudayaan dan berpenduduk sekarang mencapai 220 juta jiwa, dengan 1001 permasalahannya adalah suatu organisasi besar dan kompleks (*large and complex organization*).

National police bukan *centralized police* (dengan *desentralisasi administrative*, terutama pada Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar) namun tanggung jawab atas semua tugas pokok, tugas dan wewenang kepolisian secara keseluruhan berada pada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh staf di Markas Besar. Jumlah anggota Polri dewasa ini ±300.000, tersebar mulai dari MABES, Polda, Polwil, Polres, Polsek dan Pospol, mengemban tugas-tugas operasional dan pembinaan yang beraneka ragam (lihat UU No. 2, tahun 2002).

Untuk mengelola organisasi dengan personil demikian, perlulah diperluas kemampuan manajemen SDM atau personil Polri yang Professional.

Dalam struktur kepangkatan Polri, jumlah pangkat yang sekarang berjumlah 22 pangkat, diantaranya 6 pangkat tamtama dan 6 pangkat bintara. Mencermati hal tersebut, sebagai mantan KAPOLRI, saya sering menyarankan agar pangkat tamtama tetap dipertahankan dengan mengurangi menjadi 2 pangkat saja dan pangkat bintara dikurangi menjadi 3. Pangkat perwira pertama, menengah dan tinggi tidak perlu dirubah. Dengan demikian, jumlah pangkat pada Polri akan berjumlah 15. Alasan keberadaan tamtama, bintara dan perwira serta tanda pangkat seperti sekarang hendaknya jangan dirubah, karena mempunyai dampak politis-psikologis terutama dalam hubungan dengan TNI untuk 5-10 tahun mendatang.

Disini yang penting bukan jumlah personil dan pangkatnya, tapi profesionalisme (kemampuan dan etikanya). Untuk itu sistim *recruitment* dan pendidikan serta karier akan sangat menentukan.

Polri mempunyai lembaga pendidikan pembentukan tamtama (sekarang hampir hilang), bintara dan perwira ditambah dengan sarjana dari luar. Jadi ada empat pintu masuk untuk menjadi anggota Polri.

Selain itu, ada lembaga-lembaga pendidikan yang sebenarnya lembaga pendidikan manajemen kepolisian yaitu SECAPA, AKPOL, D3 PTIK, S1 PTIK, SELAPA, SESPIM dan SESPATI. Disamping jenjang pendidikan tersebut, Polri memiliki pendidikan kejuruan operasional dan pembinaan seperti Pusdik Lantas, Reserse, Intel, Sahrara dan Brimob. Juga ada Pusdik Administrasi.

Kemampuan dibidang operasional dulu ditegaskan sebagai kemampuan teknis professional khas kepolisian karena itu Polri harus benar-benar mahir dibidang ini.

Undang-undang pendidikan yang baru menyatakan perguruan tinggi terdiri atas; 1. Akademi, 2. Politeknik, 3. Sekolah Tinggi, 4. Institut dan, 5. Universitas.

Dengan demikian AKPOL dan PTIK adalah perguruan tinggi tapi perguruan tinggi kedinasan karena pendidikannya diarahkan untuk mengisi kebutuhan kedinasan, yaitu Polri. SELAPA, SESPIM dan SESPATI adalah lembaga pendidikan di atas SMA yang juga kedinasan, tapi mereka bukan perguruan tinggi, namun lembaga pendidikan tinggi non gelar.

Sesuai Undang-undang, Akademi adalah lembaga pendidikan profesi, sedangkan Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas merupakan lembaga pendidikan akademis.

Selaku anggota dan Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, saya pernah menyatakan pembedaan yang kaku antara profesi dan akademi ada kurang tepat karena banyak Sekolah Tinggi, Institut dan fakultas-fakultas dari universitas di Indonesia mencakup akademi dan profesi. Juga di luar negeri.

Karena AKPOL sangat terkait dengan PTIK, maka Departemen P&K menetapkan Universitas Diponegoro sebagai Pembina Akademis AKPOL. Mahasiswa PTIK berasal dan tamatan AKPOL yang setelah praktek beberapa tahun diuji untuk masuk PTIK. Kredit AKPOL diperhitungkan di PTIK untuk mencakupi persyaratan kredit untuk S1.

Karena praktek masuk PTIK banyak penyalahgunaan maka pada masa KAPOLRI, Da'i Bachtiar, ditetapkan tamatan AKPOL tidak perlu ujian untuk masuk PTIK. Akibatnya jumlah mahasiswa meningkat besar sekali. Untuk mengatasinya diadakan pembelajaran jarak jauh (*teleconference*) dan waktu pendidikan di PTIK dipersingkat menjadi 3 semester.

Apa tujuan PTIK, sebagai perguruan tinggi kedinasan seperti dinyatakan diatas, AKPOL dan PTIK harus dapat mengisi kebutuhan kedinasan Polri. Hanya, kebutuhan dibidang dan tingkat mana dalam organisasi Polri yang akan diisi?

3. PTIK sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan perwira sarjana yang memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen kepolisian tingkat menengah

Sebagai suatu organisasi yang besar dan kompleks, Polri membutuhkan tiga macam kemampuan; (1) kemampuan teknis professional khas kepolisian (istilah yang digunakan resmi oleh Menhankam/Pangab Jendral M. Yusuf dan KAPOLRI pada akhir tahun 70-an), (2) kemampuan management kepolisian (*police management*) tingkat dasar, menengah dan tinggi, (3) kemampuan keahlian (seperti kedokteran, kimia (forensik), fisika (forensik), akuntan, ahli manajemen personil, manajemen keuangan, hukum, perbankan, teknologi informasi, dan lain-lain. Untuk tenaga-tenaga ahli (ad 3), Polri merekrut sarjana dari luar atau mengirim perwira Polri ke universitas dalam dan luar negeri.

Kemampuan teknis professional khas kepolisian, antara lain; reserse (*scientific criminal investigation*), intelijen kepolisian, kepolisian lalu lintas, kesabharan (*general duty police*), *crowd control*, *riot control*, bidang-bidang identifikasi dan laboratorium forensik, satwa kepolisian, dan sebagainya. Untuk membina kemampuan teknis professional tersebut, Polri mendirikan Pusat Pendidikan (Pusdik) tersendiri dan kerjasama tehnik dengan luar negeri, seperti dengan *Bundes Kriminal Amt* (Jerman) dan lalu lintas di Appeldoorn, Belanda.

Seperti diuraikan terdahulu, sejak lama Polri telah menetapkan bahwa pelaksanaan tugas Polri akan dititik beratkan pada Polres sebagai kesatuan lapangan yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki unsur-unsur operasional yang lengkap disebut Komando Operasional Dasar (KOD) dengan Polsek sebagai "ujung tombak". Kebijakan mengenai KOD ini kemudian didukung oleh Bayley dalam bukunya "*Police for the Future*".

Mengingat kebutuhan akan KAPOLRES yang memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen kepolisian tingkat menengah dan PTIK hanya memiliki satu jurusan, maka jurusan itu adalah Administrasi Kepolisian. Tentu tidak semua tamatan PTIK akan jadi KAPOLRES, tapi kemampuan manajemen kepolisian KAPOLRES dijadikan pola bagi pejabat manajemen menengah, termasuk manajemen fungsional seperti kepala bagian reserse, kepala bagian lalu lintas, juga kepala bagian personalia, keuangan, dan sebagainya.

Administrasi Kepolisian yang saya kembangkan selaku Dekan selama 15 tahun di PTIK adalah *inter-disciplinair* dan mengelompokkan mata pelajaran dalam:

- 1) Kelompok ilmu sosial
- 2) Kelompok ilmu hukum
- 3) Kelompok ilmu administrasi dan manajemen
- 4) Kelompok ilmu-ilmu pendukung (seperti statistic, metodologi research, bahasa Ingeris, dan sebagainya).

Semua mata pelajaran dan semua kelompok diarahkan pada kemampuan manajemen kepolisian menengah. Kelompok ilmu administrasi dan manajemen, selain memberikan teori, prinsip dan teknik administrasi dan manajemen, juga manajemen operasional dan manajemen pembinaan Polri.

4. Keserasian SECAPA, AKPOL, PTIK, SELAPA dan SESPIM serta SESPATI

Dalam beberapa penulisan saya sering menyatakan bahwa sistim manajemen Polri adalah merupakan sub-sistem manajemen personal atau SDM Polri. Oleh karena itu seluruh pendidikan Polri (dilingkungan dan diluar lingkungan Polri) harus merupakan satu keseluruhan, khususnya lembaga pendidikan yang bukan kejuruan, tapi lebih manajerial seperti SECAPA, AKPOL, PTIK, SELAPA, SESPIM dan SESPATI, harus benar-benar serasi satu sama lain.

Pendidikan SECAPA dan AKPOL adalah pendidikan manajemen kepolisian tingkat bawah (*supervisory level*); PTIK dan SELAPA untuk tingkat menengah; SESPIM dan SESPATI untuk tingkat menengah tinggi dan tingkat tinggi.

SELAPA dan SESPIM mulanya adalah lembaga-lembaga pendidikan TNI yang disebut SEKKO dan SESKO, Sekolah Komando dan Sekolah Staf dan Komando, yang titik beratnya manajerial. Kemudian juga dianut oleh kepolisian.

Bayley mengatakan terlepas dari sistem kepolisian suatu Negara, kegiatan kepolisian yang paling utama adalah ditingkat kesatuan yang paling dekat dengan masyarakat serta lengkap unsur-unsur operasionalnya. Ia menamakan kesatuan demikian *Basic Police Unit* (BPU), seperti *precinct* di kepolisian LAPD, NYPD, dan sebagainya.

Buku-buku "*police administration*" di Amerika Serikat, banyak yang membahas "*city police administration, country police administration* dengan *precinct-precinct* nya.

Karena pentingnya peran Polres sebagai KOD, terutama dalam era desentralisasi dewasa ini, maka kemampuan seorang KAPOLRES akan menentukan keberhasilan Polri secara keseluruhan.

Kemampuan KAPOLRES, sebagai pimpinan Polres, adalah kemampuan manajemen kepolisian tingkat menengah (*middle police management capability*). Disamping memimpin anggotanya ia harus mampu bekerjasama dengan Bupati/Walikota dan tokoh-tokoh masyarakat.

Karena itu, PTIK sebagai satu Sekolah Tinggi, walaupun dapat memiliki jurusan-jurusan (dahulu memang pernah ada gagasan tiga jurusan; 1. hukum kepolisian, 2. administrasi kepolisian dan 3. teknologi kepolisian) kenyataan sampai sekarang hanya memiliki satu jurusan. Agar sesuai dengan kebutuhan kedinasan yang akan mengutamakan KOD, serta keserasian dengan AKPOL, SELAPA dan SESPIM, maka satu jurusan di PTIK itu adalah Administrasi Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai Sekolah Tinggi dengan satu jurusan, PTIK dapat mengadakan kekhususan sesuai dengan kebutuhan kedinasan.

Kiranya Polri perlu mengkaji ulang lembaga pendidikan yang disinggung diatas, termasuk persyaratan kepangkatan bagi siswanya.

III. Kajian Ilmu Kepolisian UI dan kaitannya dengan sistim pendidikan Polri

Walaupun ilmu kepolisian secara resmi telah diakui keberadaannya pada tahun 1980, tapi pendidikan D3 dan S1 nya hanya diberikan di AKPOL dan PTIK sebagai perguruan tinggi kedinasan.

Saat saya menjabat KAPOLRI bersama Dekan Prof Harsya Bachtiar, kini mulai menjajaki pemantapan ilmu kepolisian dengan mengadakan pendidikan pascasarjana dan yang terbuka tidak hanya untuk anggota Polri.

Pemerintah (Departemen P&K) mulanya hanya mengizinkan empat universitas negeri untuk menyelenggarakan pendidikan pascasarjana, yaitu UI, UGM, ITB dan IPB. Perguruan tinggi negeri dan swasta yang lain belum boleh.

Sampai saya pensiun (akhir 1982) dan menggantikan Harsya Bachtiar sebagai Dekan pada tahun 1987, kami berdua terus mengusahakan agar UI menyelenggarakan pendidikan pascasarjana ilmu kepolisian.

Berkali-kali pertemuan dan pembahasan dilakukan di UI. Mulanya diusahakan agar UI menjadikan ilmu kepolisian sebagai program studi. Setelah beberapa kali pergantian Rektor UI maka pada masa Rektor Prof. Tadjudin, ia mengatakan bahwa prosedur untuk program studi cukup repot, karena memerlukan persetujuan seluruh anggota Konsorsium Ilmu-Ilmu Sosial. Prof. Tadjudin menyarankan program pascasarjana ilmu kepolisian dimasukkan dalam kelompok kajian yang ada di Fakultas Pascasarjana UI. Mengenai gelar dari pascasarjana ilmu kepolisian, saya menanyakan kepada Prof. Tadjudin, apakah gelar untuk Kajian sama dengan program studi? Prof Tadjudin mengatakan sama. Setelah itu pendidikan pascasarjana ilmu kepolisian dimasukkan dalam kelompok Kajian UI.

Menindaklanjuti hal tersebut kemudian diadakanlah rapat-rapat gabungan untuk mempersiapkan program KIK. Disepakati antara lain bahwa fasilitas fisik disiapkan oleh Polri dan Polri akan mengadakan bea siswa bagi perwira-perwira Polri untuk mengikuti program KIK.

Sebagai langkah lanjutan lainnya, saya meng-*approach* Prof. Mardjono agar bersedia dicalonkan menjadi Ketua Program KIK pertama, mengingat gagasan KIK juga dipelopori oleh Prof. Harsya Bachtiar, yang kebetulan kakak ipar Prof. Mardjono.

Setelah segala persiapan selesai maka kuliah pertama KIK UI dapat dimulai tahun 1996 di kompleks PTIK. Mulanya, KIK merencanakan tiga kekhususan, yaitu; 1. hukum kepolisian, 2. administrasi kepolisian dan 3. teknologi kepolisian.

Namun karena kesulitan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk teknologi kepolisian maka kekhususan tersebut diganti dengan Manajemen Sekuriti.

Manajemen sekuriti yang fokusnya adalah pada "*private security*" (di Indonesia sejak lama sudah dikenal sebagai pengamanan swakarsa terutama di sektor modern) adalah mitra utama kepolisian di semua negara. Tidak mungkin keamanan dan ketertiban dan penegakkan hukum dapat berhasil hanya oleh instansi kepolisian betapapun besar dan canggihnya.

Di Indonesia, pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan *private security* yang termasuk bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah tugas dan tanggung jawab Polri. Bahkan termasuk pemberian ijin operasional bagi badan usaha jasa pengamanan. (lihat UU No. 2, 2002).

Polri memerlukan anggota yang professional yang mencakupi hampir semua disiplin ilmu. Maka keberadaan Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (S2 KIK UI) diharapkan akan dapat mengisi sebagian kebutuhan tersebut, yaitu melahirkan sarjana (Polri dan non-Polri) yang memiliki wawasan yang luas, yang dapat mengadakan analisa tentang keadaan Polri dan negara serta dapat memberikan saran pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.

Sekali lagi, Polri adalah organisasi besar dan kompleks namun merupakan satu keseluruhan, satu sistim. Karena itu pendekatan pemecahan masalah-masalahnya tidak boleh dilakukan secara terkotak-kotak, tapi selalu memperhatikan saling keterkaitan (*holistik*).

Kini KIK-UI telah menghasilkan banyak sarjana S2 dan 3 orang doktor ilmu kepolisian (S3). Walau KIK-UI bukan perguruan tinggi kedinasan namun para mahasiswa dan lulusannya harus peka terhadap keadaan dan masalah yang dihadapi Polri, baik pengaruh external, masalah operasional maupun masalah pembinaan.

Polri tidak perlu membentuk program pascasarjana ilmu kepolisian secara kedinasan tapi secara nyata wajib membantu dan memanfaatkan keberadaan KIK-UI, yang walaupun berada di bawah bendera Universitas Indonesia, gagasan dan prakarsanya lahir dari Polri sendiri di dalam usaha memantapkan dan mengembangkan keberadaan ilmu kepolisian di Indonesia serta memperluas pengetahuan dan wawasan para perwiranya.